

REKAPITULASI SOP POLRES TANJUNGPINANG

NO	SATKER	SOP			KET
		JUDUL / NOMOR	TMT	REFERENSI	
1	2	3	4	5	6
1	BAG OPS	- SOP MANAJEMEN PENGAMANAN KEGIATAN MASYARAKAT	5 JANUARI 2021	- UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPublK INDONESIA - PERKAP NO 23 TAHUN 2011 TENTANG STOK TINGKAT POLRES	
2	BAG REN	- SOP PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENTRA) POLRES TANJUNGPINANG - SOP PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA (RAN RENJA) POLRES TANJUNGPINANG - SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) POLRES TANJUNGPINANG	9 JANUARI 2021	- UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPublK INDONESIA - UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA - PP NOMOR 21 TAHUN 2004 TENTAG PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA - PERKAP NO 17 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERENCANAAN STRATEGIS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - PEPRES RI NO 29 TAHUN 2014 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH - PERKAP NO 7 TAHUN 2015 TENTANG REVISI PERKAP 20 TAHUN 2012 TENTANG LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN POLRI	

		1. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	SEPTEMBER 20	<ul style="list-style-type: none"> - PERKAP NO. 22 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN DAERAH; - KEP KAPOLRI NO.POL : KEP/54/X/2002 TANGGAL 17 OKTOBER 2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN – SATUAN ORGANISASI PADA TINGKAT KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH (POLDA DAN PERUBAHANNYA; - UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK; - UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK 	
2	BAG SUMDA	<ul style="list-style-type: none"> - SOP UJIAN KESAMAPTAAN JASMANI BERKALA BAGI PERSONEL POLRES TANJUNGPINANG - SOP STANDAR OPERASIONAL PROSUDER USULAN KENAIKAN PANGKAT ANGGOTA POLRI - SOP KENAIKAN GAJI BERKALA BAGI PERSONEL POLRES TANJUNGPINANG - SOP TATA CARA PENGAJUAN TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN - SOP BANTUAN HUKUM DILINGKUNGAN POLRES TANJUNGPINANG 	<p>6 JANUARI 2020</p> <p>16 DESEMBER 2018</p> <p>5 JANUARI 2019</p> <p>6 JANUARI 2020</p> <p>5 JANUARI 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> - UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - KEP KAPOLRI NOMOR : SKEP/984/XII/2004 TANGGAL 28 DESEMBER 2004 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI UJIAN KESAMAPTAAN JASMANI DAN BELADIRI POLRI BAGI PEGAWAI NEGERI PADA POLRI - PERKAP KAPOLRI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI KEPANGKATAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - PERKAP KAPOLRI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPOLRI - PERKAP KAPOLRI NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM MANAJEMEN KINERJA - PERKAP NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG KENAIKAN GAJI BERKALA BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - PERKAP KAPOLRI NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN - UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM - UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG ASN - PP NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG 	

				<p>PEMBERHENTIAN ANGGOTA POLRI</p> <ul style="list-style-type: none"> - PP NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN - PP NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG PELAKSANAAN TEKNIS INSTITUSIONAL PERADILAN UMUM BAGI POLRI - PP NOMOR 42 TAHUN 2010 TENTANG HAK ANGGOTA POLRI - PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN DISIPLIN PNS - PERKAP NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG SOTK PADA TINGKAT POLRES DAN POLSEK - PERATURAN KAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI POLRI 	
3	SAT RESKRIM	<ul style="list-style-type: none"> - SOP SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP) - SOP PEMANGGILAN SAKSI DAN TERSANGKA - SOP PENGGELEDAHAN - SOP PENANGKAPAN - SOP PENYITAAN - SOP PENAHANAN - SOP PENYELESAIAN DAN PENYERAHAN BERKAS PERKARA - SOP PENGAWASAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA - SOP PENERTIBAN REKOMENDASI CATATAN KRIMINAL SAT RESKRIM POLRES TANJUNGPINANG - SOP PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI - SOP PENYALURAN LAPORAN POLISI 	7 MARET 2020	<ul style="list-style-type: none"> - UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - PERKAP NOMOR 22 TAHUN 2010 TANGGAL 28 OKTOBER 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN DAERAH - PERKAP NO. 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA; - PERATURAN KABARESKRIM POLRI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERENCANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA - PERATURAN KABARESKRIM POLRI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSUDER PENGORGANISASIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA - PERATURAN KABARESKRIM POLRI NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSUDER PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA - PERATURAN KABARESKRIM POLRI NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSUDER PENGAWASAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA 	

				<ul style="list-style-type: none"> - PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SOP ADMINISTRASI PEMERINTAH. - PERKAP NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENERTIBAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN - GRAND STATEGI POLRI - REFORMASI BIROKRASI POLRI - UU RI NO.8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA - UU RI NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO.20 TAHUN 2001 - UURI NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI - SKEP KAPOLRI NO.POL KEP/37/X/2008 TANGGAL 27 OKTOBER 2008 TENTANG PROGRAM AKSELERAS - PERKAP NOMOR 23 TAHUN 2010 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN RESORT DAN KEPOLISIAN SEKTOR 	
4	SATSABHARA	<ul style="list-style-type: none"> - SOP DALMAS (PENANGANAN UNJUK RASA) - SOP PATROLI - SOP PENGAWALAN - SOP PENJAGAAN MAKO - SOP RAIMAS - SOP SAR - SOP TIPIRING - SOP TPTKP - SOP PAM OBVIT 	2 JULI 2020	<ul style="list-style-type: none"> - UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLK INDONESIA - PERKAP NO. 22 TAHUN 2011 TENTANG STOK TINGKAT POLDA; - PERKAP NO. 16 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN MASSA; - PERKAP NO.4 TAHUN 2011 TANGGAL 13 DESEMBER 2011 TENTANG PATROLI; - PERMENPAN RB NOMOR 35 TAHUN 2012 TANGGAL 19 JUNI 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 	

				<ul style="list-style-type: none"> - PERKABARHAKAM NOMOR 3 TAHUN 2011 TANGGAL 13 DESEMBER 2009 TENTANG PENGAWALAN - PERKAP NOMOR 23 TAHUN 2010 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN RESORT DAN KEPOLISIAN SEKTOR - PERKABARHAKAM NOMOR 2 TAHUN 2011 TANGGAL 13 DESEMBER 2009 TENTANG PENJAGAAN - PERKABAHARKAM NO 1 TAHUN 2012 TENTANG PELETON PENGURAI MASSA - PERKABAHARKAM NO 250 TAHUN 2004 TENTANG SAR TERBATAS - PERKABAHARKAM NO 259 TAHUN 2004 TENTANG TIPIRING - PERKABARHARKAM NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG TINDAKAN PERTAMA DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TPTKP) - PERKAP NO. 13 TAHUN 2017 TANGAL 22 AGUSTUS 2017 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENGAMANAN PADA OBVITNAS DAN OBJEK TERTENTU. 	
5	SAT TAHTI	<ul style="list-style-type: none"> - SOP PELAKSANAAN JAGA TAHANAN RUTAN POLRES TANJUNGPINANG - SOP BESUK TAHANAN 	5 JULI 2020	<ul style="list-style-type: none"> - UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLK INDONESIA - PERKAP NO. 22 TAHUN 2011 TENTANG STOK TINGKAT POLDA - PERKAP NO. POL 4 TAHUN 2005 TANGGAL 5 JULI 2005 TENTANG PENGURUSAN TAHANAN PADA RUMAH TAHANAN; - PERKAP NO. POL 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGURUSAN PERAWATAN TAHANAN DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 	

6.	SPKT	<ul style="list-style-type: none"> - SOP PELAYANAN PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT - SOP TANDA TERIMA LAPORAN POLISI (STTLP) - SOP PELAYANAN VISUM ET REPERTUM (VER) 	2 DESEMBER 2020	<ul style="list-style-type: none"> - UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLK INDONESIA - UU NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA YAITU KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM MASUK DALAM ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI ATAU ALAT BUKTI YANG SAH - UU NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK - PERKAP NO. 23 TAHUN 2010 TANGAL 30 SEPTEMBER 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT POLRES DAN POLSEK MEMPERHATIKAN PASAL 37 AYAT (1) AYAT (2) DAN AYAT (3) TENTANG TUGAS DAN FUNGSI SPKT PENGKOORDINASIAN SATUAN – SATUAN FUNGSI DIBIDANG PELAYANAN - PERATURAN KAPOLRI NO.POL : 12 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DILINGKUNGAN POLRI 	
7	SAT NARKOBA	<ul style="list-style-type: none"> - SOP SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP) - SOP PEMANGGILAN SAKSI DAN TERSANGKA - SOP PENGGELEDAHAN - SOP PENYITAAN - SOP PENANGKAPAN - SOP PENAHANAN - SOP PENYELESAIAN DAN PENYERAHAN BERKAS PERKARA - SOP PENGAWASAN PENYINDIKAN TINDAK PIDANA 	4 JANUARI 2021	<ul style="list-style-type: none"> - UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLK INDONESIA - UNDANG – UNDANG NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA; - UNDANG – UNDANG NO 36 TAHUN TENTANG KESEHATAN; - UNDANG – UNDANG NO 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA. - PASAL 1 BUTIR 2, PSL 7 AYAT (1) HURUF E, PSL 112, PSL 113, PSL 119, PSL 1 20 KUHP - UNDANG – UNDANG YANG DIPERSANGKAKAN - LAPORAN POLISI - SURAT PERINTAH TUGAS - SURAT PERINTAH PENYIDIKAN - BUKU REGISTER SURAT PANGGILAN - AGENDA TANDA TERIMA SURAT PANGGILAN - UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHP - PERKAP NO. 14 TAHUN 2012 TENTANG 	

				<p>MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA</p> <ul style="list-style-type: none"> - JUKLAK DAN JUKNIS ADMINISTRASI PENYIDIKAN NOMOR : SKEP/1205/IX/200, TANGGAL 11 SEPTEMBER 2000 - STANDART INTERNASIONAL ISO 9001;2008 - PP NO 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDNAG – UNDANG ACARA PIDANA - PP RI NOMOR 58 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM ACARA PIDANA - KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN NOMOR : M.01.PW/1982 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KUHAP - KEPUTUSAN BERSAMA MAHKAMAH AGUNG, MENTERI KEHAKIMAN, JAKSA AGUNG DAN KEPALA KEPALA KEPOLISIAN NO KMA/003/SKB/II,M02.PW.07.03.Th-1998,Kep/007/JA/2/1998 DAN PoL Kep/02/B/1998 TAHUN 1998 TENTANG PEMANTAPAN KETERPADUAN DALAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA – PERKARA PIDANA - BUKU PETUNJUK PELAKSANAAN, BUKU PETUNJUK LAPANGAN DAN BUKU PETUNJUK ADMINISTRASI PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NO.POL Skep/1205/IX/2000 TANGGAL 11 SEPTEMBER 2000 - PERKAP NO 12 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - PP 27 TAHUN 1993 TENTANG PELAKSANAAN KUHP - PERKAP 22 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA KEWILAYAHAN - PERKAP NO. 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI POLSRI 	
8	SAT INTELKAM	- SOP PELAYANAN PENERTIBAN SURAT	17 FEBRUARI 2019	- UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA	

		<p>KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK)</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOP PELAYANAN SURAT PERIZINAN DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN MASYARAKAT - SOP PEMBUATAN LAPORAN INFORMASI - SOP SURAT REKOMENDASI PERIZINAN SENJATA API - SURAT REKOMENDASI PERIZINAN PINJAM PAKAI SENJATA API NON ORGANIK TNI/POLRI UNTUK BERBURU - SURAT REKOMENDASI PERIZINAN PINJAM PAKAI SENJATA API NON ORGANIK TNI/POLRI UNTUK OLAHRAGA - SOP PELAYANAN SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM - SOP PELAYANAN SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN KAMPANYE - SOP PEMBUATAN LAPORAN DETEKSI DINI (EARLY DETECTION) - SOP PEMBUATAN LAPORAN PERINGATAN DINI (EARLY WARNING) - SOP PELAYANAN SURAT PERIZINAN DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN MASYARAKAT - SOP PEMBUATAN LAPORAN PEMBENTUKAN JARINGAN INTELIJEN - SOP INOVASI PELAYANAN PENERTIBAN SURAT KETERANGAN CATATAN 		<p>REPUBLIK INDONESIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - UU NO 25 TA 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK - PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI NOMOR 35 TA 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN - PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI NOMOR 36 TA 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN - PERKAP NO 18 TA 2014 TGL 28 NOVEMBER 2014 TENTANG TATACARA PENERTIBAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN - PETUNJUK LAPANGAN KAPOLRI NO.POL : JUKLAP/02/XII/1995 TGL 29 DESEMBER 1995 TENTANG PERIZINAN DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN MASYARAKAT - SKEP KAPOLRI NO.POL : SKEP/37/I/2005 TGL 31 JANUARI 2005 TENTANG PEDOMAN INTELIJEN KEAMANAN DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA RI - PERATURAN KABA INTELKAM NO 2 TA 2012 TANGGAL 14 MARET 2012 TENTANG PENYELENGGARAN PRODUK INTELIJEN KEAMANAN POLRI BESERTA PERUBAHANNYA - INSTRUKSI KAPOLRI NO.POL : INS/01/II/1997 TANGGAL 27 FEBRUARI TENTANG KEWAJIBAN MEMBUAT LAPORAN INFORMASI BAGI SETIAP ANGGOTA POLRI SEBAGAI TINDAK PENCEGAHAN SECARA DINI TERHADAP KEMUNGKINAN TERJADINYA GANGGUAN KAMTIBMAS - KAWAT SANDI KAPOLRI NO.POL : KS/SI/XI/2001 TGL 29 DESEMBER 2001 TENTANG PERINTAH UNTUK MENINGKATKAN PEMBUATAN LAPORAN INFORMASI 	
--	--	--	--	--	--

		KEPOLISIAN (SKCK)		<ul style="list-style-type: none"> - PERKAP NO.11 TA 2017 TGL 21 JULI 2017 TENTANG PERIZINAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENJATA API NON ORGANIK TNI/POLRI DAN PERLATAN KEAMANAN YANG DIGOLONGKAN SENJATA API BAGI PENGEMBAN FUNGSI KEPOLISIAN LAINNYA - PERKAP NO 8 TA 2012 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENPI UNTUK KEPENTINGAN OLAHRAGA - PERKAP NO 18 TA TA 2015 TGL 4 DESEMBER 2015 TENTANG PERIZINAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENPI NON ORGANIK POLRI/TNI UNTUK KEPENTINGAN BELADIRI - PERKAP NO 8 TA 2012 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENPI UNTUK KEPENTINGAN OLAHRAGA - UU RI NO 2 TA 2002 TENTANG PELAYANAN PUBLIK - UU NO 9 TA 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM - PP RI NO 60 TA 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA POLRI - UU NO 7 TA 2017 TENTANG PEMILU - PERATURAN KPU TENTANG KAMPANYE PEMILU - SKEP KAPOLRI NO.POL : SKEP/448/IX/2007 TGL 14 SEPTEMBER 2007 TENTANG PEDOMAN PRODUK INTELIJEN DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA RI 	
--	--	-------------------	--	---	--

9	SAT BINMAS	<ul style="list-style-type: none"> - SOP PEMBINAAN PERPOLISIAN MASYARAKAT - SOP PEMBINAAN POLSUS (KEPOLISIAN KHUSUS) - SOP PEMBINAAN DAN PENYULUHAN - SOP PEMBINAAN AWAK POSKAMLING (SISKAMLING) - SOP PEMBINAAN KEAMANAN SWAKARSA KEPADA INSTANSI, BADAN PEMERINTAHAN / PERUSAHAAN PENGGUNA JASA SATPAM - SOP REGISTRASI SURAT/STR/TR MASUK 	2 JANUARI 2020	<ul style="list-style-type: none"> - UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - PERKAP NOMOR 21 TANGGAL NOPEMBER 2007 TENTANG BIMBINGAN PENYULUHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT; - KEP KEPALA BADAN PEMELIHARAAN KEAMANAN POLRI NO : KEP/35/VI/2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBINAAN KETERTIBAN MASYARAKAT - PERATURAN KAPOLRI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG POLMAS - PERATURAN KAPOLRI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN TEKNIS POLSUS - PERKAP NO 23 TAHUN 2007 TENTANG SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN - PERKAP NO 24 TAHUN 2007 TENTANG SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN ORGANISASI, PERUSAHAAN DAN / ATAU INSTANSI / LEMBAGA PEMERINTAH - PERKAP NO 22 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT POLDA - PERKAP NO 23 TAHUN 2010 TENTANG SUSUAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT POLRES 	
---	------------	--	----------------	---	--

10	SAT LANTAS	<ul style="list-style-type: none"> - SOP PELAYANAN PENERTIBAN SIM BARU - SOP PELAYANAN PENERTIBAN SIM PERPANJANGAN - SOP PELAYANAN PENERTIBAN SIM KELILING - SOP PELAYANAN PENERTIBAN STNK KENDARAAN BARU - SOP PELAYANAN PENERTIBAN STNK PENGESAHAN 5 TAHUNAN, DUPLIKAT, GANTI NAMA NO. REG, GANTI ALAMAT, RUBENTINA DAN GANTI MESIN - SOP PELAYANAN PENGESAHAN TAHUNAN - SOP PELAYANAN SAMSAT CORNER - SOP PELAYANAN SAMSAT KELILING - SOP PELAYANAN SAMSAT PEMBANTU - SOP PELAYANAN SAMSAT ANTAR PULAU - SOP PELAYANAN SAMSAT LINK - SOP PELAYANAN PENERTIBAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) UNTUK KENDARAAN BERMOTOR BARU - SOP PELAYANAN PENERTIBAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) UNTUK PERUBAHAN IDENTITAS - SOP PELAYANAN PENERTIBAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR - SOP PELAYANAN 	2 JANUARI 2020	<ul style="list-style-type: none"> - UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - PER KAP NO 22 TAHUN 2010 TENTANG SOTK TINGKAT POLDA; - UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALIN DAN ANGKUTAN JALAN; - UU NO.25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; - PERATURAN PEMERINTAH NO 50 TAHUN 2010 TENTANG TARIF ATAS JENIS PNPB YANG BERLAKU PADA PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA; - PERKAP NO 9 TAHUN 2012 TENTANG SURAT IZIN MENGENEMUDI - KEPPRES RI NO 52 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN RI - UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN - PEPRES RI NO 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP KENDARAAN BERMOTOR - INSTRUKSI BERSAMA MENTERI PERTAHANAN KEAMANAN, MENDAGRI DAN MEKEU NO : Ins/03/M/X/1999, NO 29 TAHUN 1999 DAN NO 6/IMK.014/1999 TANGGAL 11 OKTOBER 1999 TENTANG PELAKSANAAN SAMSAT - PERKAP NO 5 TAHUN 2012 TANGGAL 16 FEBRUARI 2012 TENTANG REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR - PERKAP NO 22 TAHUN 2010 TANGGAL 28 SEPTEMBER 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN DAERAH 	
----	------------	--	----------------	---	--

		<p>PENERTIBAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) UNTUK PENGGANTIAN BPKB HILANG ATAU TUSAK</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOP PELAYANAN MUTASI STNK KE LUAR WILAYAH REGISTRASI BAIK DALAM POLDA MAUPUN ANTAR POLDA - SOP PELAYANAN MUTASI STNK MASUK WILAYAH REGISTRASI BAIK DALAM POLDA MAUPUN ANTAR POLDA - SOP MANAJEMEN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS TERHADAP MASYARAKAT - SOP MANAJEMEN PELAPORAN DATA LAKA LANTAS ONLINE, BULANAN, TAHUNAN DAN LAKA INSIDENTIL - SOP MANAJEMEN PENGATURAN LALU LINTAS PAGI DAN SORE 			
11	HUMAS	<ul style="list-style-type: none"> - SOP TUGAS DAN FUNGSI HUMAS POLRES TANJUNGPINANG 	2 NOVEMBER 2020	<ul style="list-style-type: none"> - UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLK INDONESIA - UNDANG – UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 	
12	SARPRAS	<ul style="list-style-type: none"> - SOP PERMOHONAN PINJAM PAKAI SENPI - SOP PROSEDUR PENDISTRIBUSIAN BMP - SOP REGISTRASI MATERILL SIMAK BMN - SOP PENDISTRIBUSIAN KAPORLAP 	2 NOVEMBER 2020	<ul style="list-style-type: none"> - UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLK INDONESIA - PERKAP NO 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN 	

		<ul style="list-style-type: none"> - SOP JASA CHEMICAL - SOP JASA KEBERSIHAN GEDUNG HALAMAN - SOP PERAWATAN RANMOR R2, R4 DAN R6 - SOP PERAWATAN SENPI GENGAM, SENPI BAHU, SENPI PINGGANG DAN GAS GUN/ SENJATA LARAS LICIN - SOP PERAWATAN PC/LAPTOP DAN PRINTER - SOP PERAWATAN AC DAN INVENTARIS - SOP TAGIHAN AIR PDAM - SOP TAGIHAN TELEPON - SOP TAGIHAN LISTRIK - SOP PENGURUSAN BMP 		<ul style="list-style-type: none"> - PERKAP NO 8 TAHUN 2009 TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - PERKAP NO 4 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PSIKOLOGI BAGI CALON PEMEGANG SENJATA ORGANIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NON ORGANIK - KEP PRES RI NO 70 TAHUN 2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA RI - KEP KAPOLRI NO : KEP/74/XI/2003 TENTANG POKOK – POKOK PENYUSUNAN LAPIS – LAPIS SUMBER DAYA MANUSIA POLRI - PERATURAN ASISTEN KAPOLRI BIDANG LOGISTIK NO.1 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - KEP PRES NO 13 TAHUN 2009 TENTANG PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA - KEP MENKEU NO : 403/KMK.06/2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSAAN PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTRIAN/LEMBAGA - PERATURAN PEMERINTAH NO 42 TAHUN 2010 TENTANG HAK – HAK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - PERATURAN KAPOLRI NO 6 TAHUN 2018 TENTANG PAKAIN DINAS 	
--	--	--	--	---	--

13	SIKEU	<ul style="list-style-type: none"> - SOP REGISTRASI SURAT/STR/TR MASUK ADMINISTRASI/PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 	2 JANUARI 2020	<ul style="list-style-type: none"> - UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLK INDONESIA - PERKAP NO 22 TAHUN 2011 TANGGAL 28 NOVEMBER 2011 TENTANG ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DILINGKUNGAN POLRI - PERKAP NO 2 TAHUN 2021 TANGGAL 14 JANUARI 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT POLRES DAN POLSEK 	
14	SIPROPAM	<ul style="list-style-type: none"> - SOP TATA CARA PENERTIBAN REHABILITASI PERSONEL DAN PEMULIHAN HAK TINGKAT POLRES TANJUNGPINANG - SOP PELAYANAN PENERIMAAN DAN PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN MASYARKAT - SOP SIDANG KKEP POLRI - SOP PENGAMANAN (PENJAGAAN) 	3 JANUARI 2020	<ul style="list-style-type: none"> - UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLK INDONESIA - PP NO 1 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - PP NO 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA RI - PER PRES NO 52 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA RI - PER PRES NO 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA RI - PERKAP NO 19 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN KOMISI KODE ETIK POLRI - PERKAP NO 21 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA ORGANISASI PADA TINGKAT MARKAS BESAR POLRI - KEP KAPOLRI NO.POL : KEP/42/IX/2004 TENTANG ATASAN YANG BERHAK MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN DILINGKUNGAN POLRI - KEP KAPOLRI NO.POL : KEP/43/IX/2004 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI 	

				<ul style="list-style-type: none"> - KEP KAPOLRI NO.POL : KEP/44/IX/2004 TENTANG TATA CARA SIDANG DISIPLIN BAGI ANGGOTA POLRI - UU NO 17 TAHUN 2007 TENTANG PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TA 2005-2025 - UU NO 14 TA 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK - UU NO 25 TA 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK - INSTRUKSI PRES NO 1 TAHUN 1989 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN MELEKAT - KEP PRES RI NO 70 TA 2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN RI - PP NO 1 TA 2003 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA RI - PP NO 2 TA 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA RI - PP NO 3 TA 2003 TENTANG PELAKSANAAN TEKNIS INSTITUSIONAL PRADILAN UMUM BAGI ANGGOTA POLRI - PER PRES NO 52 TA 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA RI - PERKAP NO 14 TA 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA RI - PERKAP NO 19 TA 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI KODE ETIK POLRI 	
15	SIWAS	- SOP PENGAWAS	23 NOVEMBER 2020	<ul style="list-style-type: none"> - UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLK INDONESIA - PERKAP NO 23 TA 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN ORGANISASI PADA TINGKAT KEPOLISIAN RESORT DAN KEPOLISIAN SEKTOR - PERATURAN INSPEKTUR PENGAWASAN UMUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TA 2015 TENTANG PENJABARAN TUGAS SEKSI PENGAWASAN 	

16	SITIPOL	- SOP PENGECEKAN REPEATER MOTOROLA DITOWER BUKIT CERMIN	22 FEBRUARI 2021	DILINGKUNGAN KEPOLISIAN RESORT - UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLK INDONESIA - RENJA POLRES TANJUNGPINANG TA 2021
17	SIUM	- SOP FUNGSI KESEKRETARIAT UMUM POLRES TANJUNGPINANG	19 FEBRUARI 2021	- UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLK INDONESIA - PERKAP NO 23 TA 2010 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN RESORT DAN KEPOLISIAN SEKTOR - KEP KAPOLRI NO : KEP/313/V/2010 TANGGAL 19 MEI 2010 TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP KEPOLISIAN NEGARA RI - KEP KAPOLRI NO : KEP/314/V/2010 TANGGAL 19 MEI 2010 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP NON KEPEGAWAIAN DAN NON KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA RI - PERKAP NO 7 TA 2017 TANGGAL 31 MEI 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN KEPOLISIAN - RENJA POLRES TANJUNGPINANG TA.2021
18	POLSEK KKP	- SOP UNIT SAMAPTA POLSEK KKP - SOP PENJAGAAN MAKO - SOP PENGAWALAN - SOP PATROLI - SOP TINDAKAN PERTAMA DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TPTKP) - SOP KESEKRETARIAT (SIUM) - SOP PUBLIKASI (SIE HUMAS) SOP PELIPUTAN DAN DOKUMENTASI - SOP PEMBUATAN LAPORAN INFORMASI (UNIT INTELKAM) - SOP PENYELIDIKAN INTELIJEN	12 JANUARI 2021	- UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLK INDONESIA - PERKABARHARKAM NO 2 TA 2011 TANGGAL 13 DESEMBER 2009 TENTANG PENJAGAAN - PERKAP NO 23 TA 2010 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN RESORT DAN KEPOLISIAN SEKTOR - PERMENPAN RB NO 35 TA 2012 TANGGAL 19 JUNI 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAH - PERKABARHARKAM NO 3 TA 2011 TANGGAL 13 DESEMBER 2009 TENTANG PENGAWALAN - PERKAP NO. 22 TAHUN 2011 TENTANG STOK TINGKAT POLDA

	<ul style="list-style-type: none"> - SOP PENYALURAN LAPORAN POLISI (UNIT RESKRIM) - SOP SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP) - SOP PEMANGGILAN SAKSI DAN TERSANGKA - SOP PENGGELEDAHAN - SOP PENYITAAN - SOP PENANGKAPAN - SOP PENAHANAN - SOP PENYELESAIAN DAN PENYERAHAN BERKAS PERKARA - SOP PENGAWASAN - SOP UNIT BINMAS POLSEK KKP SBP - SOP PELAYANAN PENERIMAAN DAN PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT 	<p>13 JANUARI 2021</p> <p>7 JANUARI 2021</p> <p>8 JANUARI 2021</p> <p>12 JANUARI 2021</p> <p>7 JANUARI 2019</p> <p>7 JANUARI 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PERKAP NO.4 TAHUN 2011 TANGGAL 13 DESEMBER 2011 TENTANG PATROLI - PERKAP NO. 23 TAHUN 2010 TANGAL 30 SEPTEMBER 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT POLRES DAN POLSEK - PERKABARHARKAM NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG TINDAKAN PERTAMA DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TPTKP) - KEP KAPOLRI NO : KEP/313/V/2010 TANGGAL 19 MEI 2010 TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP KEPOLISIAN NEGARA RI - KEP KAPOLRI NO : KEP/314/V/2010 TANGGAL 19 MEI 2010 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP NON KEPEGAWAIAN DAN NON KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA RI - PERKAP NO 7 TA 2017 TANGGAL 31 MEI 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN KEPOLISIAN - RENJA POLRES TANJUNGPINANG TA.2021 - UNDANG – UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK - UU NO 25 TA 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK - GRAND STRATEGI POLRI 2004 – 2025 - RENSTRA POLRI 2010 – 2014 - REFORMASI BIROKRASI POLRI - SKEP KAPOLRI NO.POL : SKEP/37/I/2005 TANGGAL 31 JANUARI 2005 TENTANG PEDOMAN INTELIJEN KEMAMAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA RI - PERATURAN KABA INTELKAM NO 2 TA 2012 TANGGAL 14 MARET 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PRODUK INTELIJEN KEAMANAN POLRI BESERTA PERUBAHANNYA - INSTRUKSI KAPOLRI NO.POL : INS/01/II/1997 TANGGAL 27 FEBRUARI TENTANG KEWAJIBAN MEMBUAT LAPORAN INFORMASI BAGI SETIAP ANGGOTA POLRI SEBAGAI TINDAK PENCEGAHAN SECARA DINI TERHADAP KEMUNGKINAN TERJADINYA GANGGUAN KAMTIBMAS - KAWAT SANDI KAPOLRI NO.POL : KS/SI/XI/2001 TGL 29 DESEMBER 2001 TENTANG PERINTAH UNTUK MENINGKATKAN PEMBUATAN LAPORAN INSFORMASI 	
--	--	---	--	--

				<ul style="list-style-type: none">- PERATURAN KEPALA BADAN INTELIJEN KEAMANAN POLRI NO 1 TA 2013 TENTANG PENYELIDIKAN INTELIJEN POLRI- SKEP KAPOLRI NO.POL KEP/37/X/2008 TANGGAL 27 OKTOBER 2008 TENTANG PROGRAM AKSELERAS- PERKAP NOMOR 23 TAHUN 2010 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN RESORT DAN KEPOLISIAN SEKTOR- PERKAP NO. 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA- PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SOP ADMINISTRASI PEMERINTAH.- PERKAP NOMOR 22 TAHUN 2010 TANGGAL 28 OKTOBER 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN DAERAH- PERATURAN KABARESKRIM POLRI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERENCANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA- PERATURAN KABARESKRIM POLRI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSUDER PENGORGANISASIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA- PERATURAN KABARESKRIM POLRI NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSUDER PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA- PERATURAN KABARESKRIM POLRI NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSUDER PENGAWASAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA- UU NO 8 TA 1981 TENTANG KITAB UU HUKUM ACARA PIDANA- PERKAP NOMOR 21 TANGGAL NOPEMBER 2007 TENTANG BIMBINGAN PENYULUHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT- KEP KEPALA BADAN PEMELIHARAAN KEAMANAN POLRI NO : KEP/35/VI/2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBINAAN KETERTIBAN MASYARAKAT- PERATURAN KAPOLRI NOMOR 3 TAHUN 2015	
--	--	--	--	--	--

				<p>TENTANG POLMAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - UU NO 17 TAHUN 2007 TENTANG PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TA 2005-2025 - UU NO 14 TA 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK - UU NO 25 TA 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK - INSTRUKSI PRES NO 1 TAHUN 1989 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN MELEKAT - KEP PRES RI NO 70 TA 2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN RI - PP NO 1 TA 2003 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA RI - PP NO 2 TA 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA RI - PP NO 3 TA 2003 TENTANG PELAKSANAAN TEKNIS INSTITUSIONAL PRADILAN UMUM BAGI ANGGOTA POLRI 	
				<ul style="list-style-type: none"> - PER PRES NO 52 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA RI - PER PRES NO 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA RI - PERKAP NO 19 TA 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI KODE ETIK POLRI - KEP KAPOLRI NO.POL : KEP/42/IX/2004 TENTANG ATASAN YANG BERHAK MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN DILINGKUNGAN POLRI - KEP KAPOLRI NO.POL : KEP/43/IX/2004 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI - KEP KAPOLRI NO.POL : KEP/44/IX/2004 TENTANG TATA CARA SIDANG DISIPLIN BAGI ANGGOTA POLRI 	

19	POLSEK KAWASAN BANDARA RH FISABILILLAH	<ul style="list-style-type: none"> - SOP PENJAGAAN MARKAS KOMANDO/PERKANTORAN POLSEK KAWASAN BANDARA RHF - SOP PATROLI - SOP PENGAMANAN OBJEK VITAL (PAM OBVIT) - SOP PEMBINAAN DAN PENYULUHAN - SOP PEMBINAAN PERPOLISIAN MASYARAKAT - SOP PEMBINAAN KEAMANAN SWAKARSA KEPADA INSTANSI, BADAN PEMERINTAHAN / PERUSAHAAN PENGGUNA JAS SATPAM - SOP PEMBINAAN POLSUS (KEPOLISIAN KHUSUS) - SOP REGISTRASI SURAT MASUK - SOP PENYIMPANAN ARSIP - SOP PENYALURAN LAPORAN POLISI 		<ul style="list-style-type: none"> - UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLK INDONESIA - PERKABARHARKAM NO 2 TA 2011 TANGGAL 13 DESEMBER 2009 TENTANG PENJAGAAN - PERKAP NO 23 TA 2010 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN RESORT DAN KEPOLISIAN SEKTOR - PERMENPAN RB NO 35 TA 2012 TANGGAL 19 JUNI 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAH - PERKAP NO. 22 TAHUN 2011 TENTANG STOK TINGKAT POLDA - PERKAP NO.4 TAHUN 2011 TANGGAL 13 DESEMBER 2011 TENTANG PATROLI - KEPRES RI NO 63 TAHUN 2004 TANGGAL 5 AGUSTUS 2004 TEMTAMG PAM OBYEK VITAL NASIONAL - PERKAP NO. 13 TAHUN 2017 TANGAL 22 AGUSTUS 2017 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENGAMANAN PADA OBVITNAS DAN OBJEK TERTENTU - PERKAP NO 21 TAHUN 2007 TENTANG BIMBINGAN PENYULUHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT - KEP KEPALA BADAN PEMELIHARAAN KEAMANAN POLRI NO : KEP/35/VI/2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBINAAN KETERTIBAN MASYARAKAT - PERATURAN KAPOLRI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG POLMAS 	
----	--	--	--	---	--

				<ul style="list-style-type: none">- PERKAP NOMOR 21 TANGGAL NOPEMBER 2007 TENTANG BIMBINGAN PENYULUHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT- PERKAP NO 24 TAHUN 2007 TENTANG SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN ORGANISASI, PERUSAHAAN DAN / ATAU INSTANSI / LEMBAGA PEMERINTAH- PERATURAN KAPOLRI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN TEKNIS POLSUS- PERKAP NO 14 TAHUN 2018 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN ORGANISASI PADA KEPOLISIAN RESOR/TA- PERKAP NO 18 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN POS POLISI- PERKAP NO 17 TAHUN 2007 TENTANG TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA- KEP KAPOLRI NO : 313/V/2010 TANGGA; 19 MEI 2010 TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP NEGARA REPUBLIK INDONESIA- KEP KAPOLRI NO : KEP/314/V/2010 TANGGAL 19 MEI 2010 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA- SKEP KAPOLRI NO.POL : KEP/37/X/2008 TANGGAL 27 OKTOBER 2008 TENTANG PROGRAM AKSELERAS- PERKAP NO 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	
--	--	--	--	--	--

				<p>PELAYANAN</p> <ul style="list-style-type: none">- PERKAP NO 18 TA 2014 TGL 28 NOVEMBER 2014 TENTANG TATACARA PENERTIBAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN- PP RI NO 60 TA 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA POLRI- SKEP KAPOLRI NO.POL : SKEP/37/I/2005 TGL 31 JANUARI 2005 TENTANG PEDOMAN INTELIJEN KEAMANAN DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA RI- PERATURAN KABA INTELKAM NO 2 TA 2012 TANGGAL 14 MARET 2012 TENTANG PENYELENGGARAN PRODUK INTELIJEN KEAMANAN POLRI BESERTA PERUBAHANNYA- KAWAT SANDI KAPOLRI NO.POL : KS/SI/XI/2001 TGL 29 DESEMBER 2001 TENTANG PERINTAH UNTUK MENINGKATKAN PEMBUATAN LAPORAN INSFORMASI- PERKAP NO. 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA- PERATURAN KABARESKRIM POLRI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERENCANAAN PENYINDIKAN TINDAK PIDANA- PERATURAN KABARESKRIM POLRI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSUDER PENGORGANISASIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA- PERATURAN KABARESKRIM POLRI NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSUDER PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA- PERATURAN KABARESKRIM POLRI NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSUDER PENGAWASAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA- PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SOP ADMINISTRASI PEMERINTAH	
--	--	--	--	--	--

21	SAT POL AIR	<ul style="list-style-type: none"> - SOP KONSISNYES MANAJEMEN PENJAGAAN MAKO - SOP PATROLI PERAIRAN SATPOLAIR POLRES TANJUNGPINANG - SOP POLMAS PERAIRAN - SOP SAR LAUT/ PERAIRAN - SOP PENANGANAN TINDAK PIDANA PERAIRAN - SOP PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN KAPAL (HARKAN KAPAL) 	<p>2 JANUARI 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI NO.8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA - PERKAP NOMOR 21 TANGGAL NOPEMBER 2007 TENTANG BIMBINGAN PENYULUHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT - PERATURAN KAPOLRI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN TEKNIS POLSUS - PERKAP NO 7 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN DASAR STRATEGI DAN IMPLEMENTASI PERPOLISIAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS - PERKAP NO 23 TA 2010 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN RESORT DAN KEPOLISIAN SEKTOR - PERATURAN KAPOLRI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG POLMAS <ul style="list-style-type: none"> - UU RI NO 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHP - UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLK INDONESIA - LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NO 21 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO 416B - UU RI NO 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN - UU RI NO 17 TAHUN 1985 TENTANG PENGESAHAN NATION CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA BANGSA TENTANG HUKUM LAUT) - UU RI NO 6 TAHUN 1996 TENTANG WILAYAH PERAIRAN INDONESIA - PERPRES NO 52 TA 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - PERKAP NO 23 TA 2010 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN RESORT DAN KEPOLISIAN SEKTOR 	
----	-------------	---	---	--	--

				<ul style="list-style-type: none">- SKEP KAPOLRI NO. POL KEP/37/X/2008 TANGGAL 27 OKTOBER 2008 TENTANG PROGRAM AKSELERAS- UU NO 25 TA 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK- PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI NOMOR 36 TA 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN- PETUNJUK LAPANGAN KAPOLRI NO.POL : JUKLAP/02/XII/1995 TGL 29 DESEMBER 1995 TENTANG PERIZINAN DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN MASYARAKAT- PP RI NO 60 TA 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA POLRI- SKEP KAPOLRI NO. POL SKEP/37/I/2005 TANGGAL 31 JANUARI 2005 TENTANG PEDOMAN INTELIJEN KEAMANAN DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA- PERATURAN KABA INTELKAM NO 2 TAHUN 2012 TANGGAL 14 MARET 2012 TENTANG PENYELENGARAAN PRODUK INTELIJEN KEAMANAN POLRI BESERTA PERUBAHANNYA- INSTRUKSI KAPOLRI NO.POL : INS/01/II/1997 TANGGAL 27 FEBRUARI TENTANG KEWAJIBAN MEMBUAT LAPORAN INFORMASI BAGI SETIAP ANGGOTA POLRI SEBAGAI TINDAK PENCEGAHAN SECARA DINI TERHADAP KEMUNGKINAN TERJADINYA GANGGUAN KAMTIBMAS- KAWAT SANDI KAPOLRI NO.POL : KS/SI/XI/2001 TGL 29 DESEMBER 2001 TENTANG PERINTAH UNTUK MENINGKATKAN PEMBUATAN LAPORAN INSFORMASI	
--	--	--	--	---	--

23	POLSEK TANJUNGPINANG KOTA	<ul style="list-style-type: none"> - SOP PENJAGAAN MARKAS KOMANDO/PERKANTORAN POLSEK TANJUNGPINANG KOTA - SOP PENGAWALAN - SOP TINDAKAN PERTAMA DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TPTKP) - SOP PATROLI - SOP SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP) - SOP PEMANGGILAN SAKSI DAN TERSANGKA - SOP PEMINDAHAN - SOP PENYITAAN - SOP PENANGKAPAN - SOP PENAHANAN - SOP PENYELESAIAN DAN PENYERAHAN BERKAS PERKARA - SOP PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN TINDAK 	<p>3 JANUARI 2020</p> <p>7 JANUARI 2020</p> <p>7 JANUARI 2020</p> <p>5 JANUARI 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PERKAP NOMOR 21 TANGGAL NOPEMBER 2007 TENTANG BIMBINGAN PENYULUHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT - KEP KEPALA BADAN PEMELIHARAAN KEAMANAN POLRI NO : KEP/35/VI/2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBINAAN KETERTIBAN MASYARAKAT - PERATURAN KAPOLRI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG POLMAS - UNDANG – UNDANG NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK - UNDANG – UNDANG NO 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK - GRAND STRATEGI POLRI 2004 – 2025 - UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TANGGAL 8 JANUARI 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLK INDONESIA - PERKABARHARKAM NO 2 TA 2011 TANGGAL 13 DESEMBER 2009 TENTANG PENJAGAAN - PERKAP NO 23 TA 2010 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN RESORT DAN KEPOLISIAN SEKTOR - PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI NOMOR 35 TAHUN 2012 TANGGAL 19 JUNI 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SOP ADMINISTRASI PEMERINTAH - PERKABARHARKAM NO 3 TA 2011 TANGGAL 13 DESEMBER 2009 TENTANG PENGAWALAN - PERKABARHARKAM NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG TINDAKAN PERTAMA DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TPTKP) - PERKAP NO.4 TAHUN 2011 TANGGAL 13 DESEMBER 2011 TENTANG PATROLI 	
----	------------------------------	---	---	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> - SOP PENYALURAN LAPORAN POLISI - SOP PELAYANAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) - PELAYANAN SURAT PERIZINAN DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN MASYARAKAT - SOP PENYELIDIKAN INTELIJEN POLRI - SOP PEMBUATAN LAPORAN INFORMASI - SOP PEMBINAAN PERPOLISIAN MASYARKAT - SOP PEMBINAAN POLSUS (KEPOLISIAN KHUSUS) 	<p>12 JANUARI 2020</p> <p>6 JANUARI 2020</p> <p>7 JANUARI 2020</p> <p>8 JANUARI 2020</p> <p>8 JANUARI 2020</p> <p>2 JANUARI 2020</p> <p>7 JANUARI 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PERKAP NO. 22 TAHUN 2011 TENTANG STOK TINGKAT POLDA - PERKAP NO. 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA - PERATURAN KABARESKRIM POLRI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERENCANAAN PENYINDIKAN TINDAK PIDANA - PERATURAN KABARESKRIM POLRI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSUDER PENGORGANISASIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA - PERATURAN KABARESKRIM POLRI NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSUDER PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA - PERATURAN KABARESKRIM POLRI NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSUDER PENGAWASAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA - PERKAP NO. 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA - PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI NOMOR 35 TAHUN 2012 TANGGAL 19 JUNI 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SOP ADMINISTRASI PEMERINTAH - UU RI NO 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHP - UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TANGGAL 8 JANUARI 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLK INDONESIA - SKEP KAPOLRI NO.POL KEP/37/X/2008 TANGGAL 27 OKTOBER 2008 TENTANG PROGRAM AKSELERAS 	
--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none">- UU NO 25 TA 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK- PERKAP NO 18 TA 2014 TGL 28 NOVEMBER 2014 TENTANG TATACARA PENERTIBAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN- PP RI NO 60 TA 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA POLRI- PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI NOMOR 36 TA 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIK PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN- PETUNJUK LAPANGAN KAPOLRI NO.POL : JUKLAP/02/XII/1995 TGL 29 DESEMBER 1995 TENTANG PERIZINAN DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN MASYARAKAT- PERATURAN KEPALA BADAN INTELIJEN KEAMANAN POLRI NOMOR 2 TAHUN 2012 TANGGAL 14 MARET 2012 TENTANG PENYELENGARAAN PRODUK INTELIJEN DILINGKUNGAN INTELIJEN KEAMANAN POLRI- PERATURAN KEPALA BADAN INTELIJEN KEAMANAN POLRI NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENYELIDIKAN INTELIJEN POLRI- SKEP KAPOLRI NO. POL SKEP/37/1/2005 TANGGAL 31 JANUARI 2005 TENTANG PEDOMAN INTELIJEN KEAMANAN DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA- PERATURAN KABA INTELKAM NO 2 TAHUN 2012 TANGGAL 14 MARET 2012 TENTANG PENYELENGARAAN PRODUK INTELIJEN KEAMANAN POLRI BESERTA PERUBAHANNYA- INSTRUKSI KAPOLRI NO.POL : INS/01/II/1997 TANGGAL 27 FEBRUARI TENTANG KEWAJIBAN MEMBUAT LAPORAN INFORMASI BAGI SETIAP ANGGOTA POLRI SEBAGAI TINDAK PENCEGAHAN SECARA DINI TERHADAP KEMUNGKINAN TERJADINYA GANGGUAN KAMTIBMAS- KAWAT SANDI KAPOLRI NO.POL :	
--	--	--	--	---	--

24	POLSEK TANJUNGPINANG BARAT	<ul style="list-style-type: none"> - SOP PEMBINAAN PERPOLISIAN MASYARAKAT - SOP PEMBINAAN DAN PENYULUHAN - SOP PEMBINAAN AWAK POSKAMLING (SISKAMLING) - SOP PEMBINAAN POLSUS (KEPOLISIAN KHUSUS) - SOP TATA CARA PENERTIBAN REHABILITASI PERSONEL DAN PEMULIHAN HAK TINGKAT POLRES TANJUNGPINANG - SOP PELAYANAN PENERIMAAN DAN PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT - SOP FUNGSI KESEKRETARIAT UMUM POLSEK TANJUNGPINANG BARAT - SOP PEMANGGILAN SAKSI DAN TERSANGKA - SOP PENGGELEDAHAN - SOP PENYITAAN - SOP PENANGKAPAN - SOP PENAHANAN 	<p>12 MARET 2020</p>	<p>KS/SI/XI/2001 TGL 29 DESEMBER 2001 TENTANG PERINTAH UNTUK MENINGKATKAN PEMBUATAN LAPORAN INSFORMASI</p> <ul style="list-style-type: none"> - PERKAP NOMOR 21 TANGGAL NOPEMBER 2007 TENTANG BIMBINGAN PENYULUHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT - KEP KEPALA BADAN PEMELIHARAAN KEAMANAN POLRI NO : KEP/35/VI/2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBINAAN KETERTIBAN MASYARAKAT - PERATURAN KAPOLRI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG POLMAS - PERATURAN KAPOLRI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN TEKNIS POLSUS <p>- UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TANGGAL 8 JANUARI 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLK INDONESIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - PERKAP NOMOR 21 TANGGAL NOPEMBER 2007 TENTANG BIMBINGAN PENYULUHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT - KEP KEPALA BADAN PEMELIHARAAN KEAMANAN POLRI NO : KEP/35/VI/2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBINAAN KETERTIBAN MASYARAKAT - PERATURAN KAPOLRI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG POLMAS - PERATURAN KAPOLRI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN TEKNIS POLSUS - PP NO 1 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - PP NO 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA RI - PER PRES NO 52 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA RI 	
----	----------------------------------	--	---	--	--

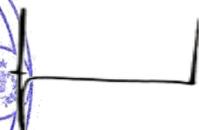
	<ul style="list-style-type: none"> - SOP PENYELESAIAN DAN PENYERAHAN BERKAS PERKARA - SOP PENYALURAN LAPORAN POLISI - SOP PELAYANAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) - SOP PEMBUATAN LAPORAN INFORMASI - SOP PENJAGAAN MARKAS KOMANDO/PERKANTORAN POLSEK TANJUNGPINANG BARAT - SOP PENGAWALAN - SOP PATROLI - SOP TINDAKAN PERTAMA DITEMPAT KEJADIAN PERKARA (TPTKP) 	<p>12 MARET 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PER PRES NO 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA RI - PERKAP NO 19 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN KOMISI KODE ETIK POLRI - PERKAP NO 21 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA ORGANISASI PADA TINGKAT MARKAS BESAR POLRI - KEP KAPOLRI NO.POL : KEP/42/IX/2004 TENTANG ATASAN YANG BERHAK MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN DILINGKUNGAN POLRI - KEP KAPOLRI NO.POL : KEP/43/IX/2004 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI - KEP KAPOLRI NO.POL : KEP/44/IX/2004 TENTANG TATA CARA SIDANG DISIPLIN BAGI ANGGOTA POLRI - UU NO 17 TAHUN 2007 TENTANG PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TA 2005-2025 - UU NO 14 TA 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK - UU NO 25 TA 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK - INSTRUKSI PRES NO 1 TAHUN 1989 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN MELEKAT - KEP PRES RI NO 70 TA 2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN RI - PP NO 1 TA 2003 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA RI - PP NO 2 TA 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA RI - PP NO 3 TA 2003 TENTANG PELAKSANAAN TEKNIS INSTITUSIONAL PRADILAN UMUM BAGI ANGGOTA POLRI - PERKAP NO 14 TA 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA RI 	
--	--	--	---	--

				<ul style="list-style-type: none">- PERKAP NO 19 TA 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI KODE ETIK POLRI- KEP KAPOLRI NO.POL : KEP/42/IX/2004 TENTANG ATASAN YANG BERHAK MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN DILINGKUNGAN POLRI- KEP KAPOLRI NO.POL : KEP/43/IX/2004 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI- KEP KAPOLRI NO.POL : KEP/44/IX/2004 TENTANG TATA CARA SIDANG DISIPLIN BAGI ANGGOTA POLRI- PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL- PERKAP NO 23 TA 2010 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN RESORT DAN KEPOLISIAN SEKTOR- KEP KAPOLRI NO : KEP/313/V/2010 TANGGAL 19 MEI 2010 TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP KEPOLISIAN NEGARA RI- KEP KAPOLRI NO : KEP/314/V/2010 TANGGAL 19 MEI 2010 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP NON KEPEGAWAIAN DAN NON KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA RI- PERKAP NO 7 TA 2017 TANGGAL 31 MEI 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN KEPOLISIAN- PERKAP NO. 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANAPERATURAN KABARESKRIM POLRI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERENCANAAN PENYINDIKAN TINDAK PIDANA- PERATURAN KABARESKRIM POLRI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSUDER PENGORGANISASIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA- PERATURAN KABARESKRIM POLRI NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSUDER PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	
--	--	--	--	---	--

				<ul style="list-style-type: none"> - PERATURAN KABARESKRIM POLRI NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSUDER PENGAWASAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA - PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI NOMOR 35 TAHUN 2012 TANGGAL 19 JUNI 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SOP ADMINISTRASI PEMERINTAH - SKEP KAPOLRI NO.POL KEP/37/X/2008 TANGGAL 27 OKTOBER 2008 TENTANG PROGRAM AKSELERAS - PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI NOMOR 36 TA 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN - SKEP KAPOLRI NO.POL : SKEP/37/I/2005 TGL 31 JANUARI 2005 TENTANG PEDOMAN INTELIJEN KEAMANAN DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA RI - PERATURAN KEPALA BADAN INTELIJEN KEAMANAN POLRI NOMOR 2 TAHUN 2012 TANGGAL 14 MARET 2012 TENTANG PENYELENGARAAN PRODUK INTELIJEN DILINGKUNGAN INTELIJEN KEAMANAN POLRI - INSTRUKSI KAPOLRI NO.POL : INS/01/II/1997 TANGGAL 27 FEBRUARI TENTANG KEWAJIBAN MEMBUAT LAPORAN INFORMASI BAGI SETIAP ANGGOTA POLRI SEBAGAI TINDAK PENCEGAHAN SECARA DINI TERHADAP KEMUNGKINAN TERJADINYA GANGGUAN KAMTIBMAS - KAWAT SANDI KAPOLRI NO.POL : KS/SI/XI/2001 TGL 29 DESEMBER 2001 TENTANG PERINTAH UNTUK MENINGKATKAN PEMBUATAN LAPORAN INSFORMASI 	
--	--	--	--	--	--

		-	<ul style="list-style-type: none">- PERKABARHARKAM NO 2 TA 2011 TANGGAL 13 DESEMBER 2009 TENTANG PENJAGAAN- PERKABARHARKAM NO 3 TA 2011 TANGGAL 13 DESEMBER 2009 TENTANG PENGAWALAN- PERKAP NO.4 TAHUN 2011 TANGGAL 13 DESEMBER 2011 TENTANG PATROLI- PERKABARHARKAM NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG TINDAKAN PERTAMA DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TPTKP)	
--	--	---	--	--

Tanjungpinang, 23 Januari 2022
KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG



H. OMPUSUNGGU, S.I.K., M.Si
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76101099

REKAPITULASI SOP INOVASI PELAYANAN POLRES TANJUNGPINANG

NO	SOP	SATKER	SOP		KET	
			JUDUL / NOMOR	TMT		
1		2	3	4	5	6
1.	INOVASI PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) POLRES TANJUNGPINANG	INTELKAM	INOVASI PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) POLRES TANJUNGPINANG	15 FEBRUARI 2021	<ul style="list-style-type: none"> - UNDANG – UNDANG RI NO.25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; - PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI NOMOR 35 TAHUN 2012 TTG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN; - PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI NOMOR 36 TAHUN 2012 TTG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN, PENERAPAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN; - PERKAP NOMOR 18 TAHUN 2014 TANGGAL 28 NOVEMBER 2014 TTG TATACARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN. 	

NO	SOP	SATKER	SOP			KET
			JUDUL / NOMOR	TMT	REFRENSI	
1		2	3	4	5	6
2.	<ul style="list-style-type: none"> - PELAYANAN SAMSAT BERGERAK (SAMBER) - STNK DELIVERY - PELAYANAN CEK FISIK ON THE SPOT SATLANTAS POLRES TANJUNGPINANG - BPKB DELIVERY SERVICE - PELAYANAN PENERTIBAN SIMLING TOBAT 	LANTAS	<ul style="list-style-type: none"> - PELAYANAN SAMSAT BERGERAK (SAMBER) - STNK DELIVERY - PELAYANAN CEK FISIK ON THE SPOT SATLANTAS POLRES TANJUNGPINANG - BPKB DELIVERY SERVICE - PELAYANAN PENERTIBAN SIMLING TOBAT 	3 NOVEMBER 2020	<ul style="list-style-type: none"> - UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALIN DAN ANGKUTAN JALAN - PEPRES RI NO 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP KENDARAAN BERMOTOR - INSTRUKSI BERSAMA MENTERI PERTAHANAN KEAMANAN, MENDAGRI DAN MEKEU NO : Ins/03/M/X/1999, NO 29 TAHUN 1999 DAN NO 6/IMK.014/1999 TANGGAL 11 OKTOBER 1999 TENTANG PELAKSANAAN SAMSAT - PERKAP NO 5 TAHUN 2012 TANGGAL 16 FEBRUARI 2012 TENTANG REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR - PERATURAN PEMERINTAH NO 50 TAHUN 2010 TENTANG TARIF ATAS JENIS PNBP YANG BERLAKU PADA PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - PERKAP NO 9 TAHUN 2012 TENTANG SURAT IZIN MENGEMUDI - KEPPRES RI NO 52 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN RI 	

Tanjungpinang, 23 Januari 2022
KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG



H. OMPUSUNGGU, S.I.K., M.Si
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76101099